



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 7101054711770301, tempat dan tanggal lahir Ayong, 07 November 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga I, Desa Sapa Induk Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, Desa Sapa, Tenga, Kab. Minahasa Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Indronusi@gmail.com sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Amg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama : Anak Pemohon

NIK : 7101050710020301

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat Kediaman : Dusun V, Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang
Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon istri :

Nama : Calon isteri anak Pemohon
NIK : 7105094410040002
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman : Jaga I, Desa Sapa induk Kecamatan Tenga
Kabupaten Minahasa Selatan

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 18 Tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dengan surat nomor: B-08/KUA.23.10.02/PW.01/I/2022, Tanggal 24 Januari 2022

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 6 bulan, bahkan telah berhubungan badan dan hamil dengan usia janin 12 Minggu;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang suami, begitu juga calon istri berstatus

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi menjadi seorang isteri dalam keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon isteri yang bernama **Calon isteri anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 18 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon isterinya dipersidangan, kemudian Hakim Tunggal juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Hakim Tunggal menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut.

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama: Anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak dari Pemohon, yang masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa, saya benar-benar berniat untuk menikah dengan calon Istri yang bernama Dija Damayanti Mokodongan atas kemauannya dan kemauan calon istrii, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa saya belum pernah menikah masih berstatus jejak;
- Bahwa, saya dan orang tua saya sudah datang menemui orang tua calon isteri untuk melamarnya dan keluarga besarnya telah menerima lamarannya tersebut;
- Bahwa, saya sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan calon istri dan siap menjadi suami yang baik;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon isteri saya sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini calon isteri saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa saya mampu menafkahi keluarga saya nanti, karena saya sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon Istri anak Pemohon yang bernama: Calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah calon isteri anak Pemohon yang masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon karena keinginan saya dan anak Pemohon sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya siap untuk menjadi istri bagi calon suami saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya adalah belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, saya dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini saya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa, saya dan anak Pemohon sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, namun ditolak, karena belum mencapai umur untuk menikah, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua calon istri anak Pemohon bernama xxxxx , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman, Jaga I, Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0- Bahwa, Saya mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena mereka Ketika beberapa waktu lalu kami telah saling bertemu membicarakan perkawinan antara anak saya dan anak Pemohon;

1- Bahwa, Saya sudah tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berniat ingin menikah dengan anak saya yang bernama Dija Damayanti Mokodongan;

2- Bahwa anak saya tidak dalam pinangan orang lain;

3- Bahwa, Pemohon dan anaknya sudah datang ke rumah saya untuk melamar anak saya dan saya sudah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;

4- Bahwa, saya tahu bahwa anak Pemohon dan anak saya benar-benar telah siap untuk menikah;

5- Bahwa, anak saya dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;

6- Bahwa, anak saya dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;

7- Bahwa, saya yakin anak saya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah dan hal ini tidak bisa ditunda lagi karena saat ini anak saya sudah hamil 3 bulan akibat perbuatannya dengan anak Pemohon

8- Bahwa, saya siap membantu menanggung segala kebutuhan anak saya dan calon suaminya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Nomor 7101054711770301 atas nama xxxx (Pemohon) tanggal 3-09-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P.1:
2. Fotokopi KTP Nomor 7101051112770301 atas nama xxx (suami Pemohon) tanggal 3-09-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P.2:
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor S-41/7105092010 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P.3:
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 7101050204190002, tanggal 06-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah sesuai dan cocok dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor 7101-LT-02042019-0052, tanggal 2 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah sesuai dan cocok dengan aslinya bukti P.5:
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon Nomor 003/MTs.23.01.006/PP.01.1/6/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Bolaang Mongondow tanggal 04 Juni 2021 telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, telah sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P.6:
7. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-08/KUA.23.10.02/PW.01/I/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.7;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. saksi umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Ayong, Kecamatan Santombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

0- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

1- Bahwa saksi kenal dengan keluarga calon istri anak Pemohon karena saksi pernah bertemu ketika membicarakan tentang rencana pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut;

2- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon, sedang calon istri anak Pemohon saksi kenal Bernama Dija Damayanti Mokodongan;

3- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun;

4- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon Istrinya yang bernama Dija Damayanti Mokodongan, karena suka sama suka;

5- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya masih berstatus belum menikah;

6- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon istri anak Pemohon Bernama Dija Damayanti Mokodongan dalam keadaan hamil 3 bulan akibat perbuatannya dengan anak Pemohon;

7- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

8- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon Istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melamar calon istrinya dan sudah diterima oleh keluarga calon istrinya;
 - 10- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon tersebut mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami nanti;
 - 11- Bahwa calon isteri anak Pemohon masih berumur 17 tahun, namun telah mengajukan dispensasi Nikah dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA Amg tanggal 3 Februari 2022
2. saksi umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Desa Sapa timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- 0- Bahwa, saksi mengenal Pemohon ketika Pemohon datang bersama keluarganya untuk melamar calon istri anak Pemohon;
 - 1- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon Bernama Anak Pemohonsejak anak Pemohon berpacaran dengan calon isterinya sekitar 6 bulan yang lalu;
 - 2- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon bernama Calon isteri anak Pemohon, karena calon isteri anak Pemohon adalah keponakan saksi ;
 - 3- Bahwa Calon isteri anak Pemohon masih berumur 17 tahun namun sudah mengajukan dispensasi nikah dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA Amg tanggal 3 Februari 2022;
 - 4- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, karena anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
 - 5- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon Istrinya yang bernama Dija Damayanti Mokodongan, bukan karena paksaan ;
 - 6- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya masih berstatus belum menikah;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon istri anak Pemohon Bernama Dija Damayanti Mokodongan dalam keadaan hamil 7 bulan akibat perbuatannya dengan anak Pemohon;

8- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

9- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dengan calon Istrinya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;

10- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah diterima oleh keluarga calon istrinya;

11- Bahwa, saksi yakin anak Pemohon tersebut mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami nanti;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon Istrinya, dan bersabar sehingga anak Pemohon mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena anak Pemohon dan calon Istrinya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon, meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat (P.1 sampai dengan P.7) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketujuh bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.7) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Anak Pemohon adalah mempunyai hubungan sebagai orangtua dan anak yang beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo* dan Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) telah terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir tanggal 7 Oktober 2003, hal mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang.

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Ijazah atas nama anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon pernah mengenyam Pendidikan di tingkat SLTP yang lulus pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya telah siap lahir maupun bathin untuk melanjutkan hubungan mereka tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti tanpa ada paksaan, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan akibat perbuatannya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165 R.Bg.-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 7 Oktober 2003 (18 tahun 4 bulan) ;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon yang Bernama Calon isteri anak Pemohon berumur 17 tahun 4 bulan
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya yang Bernama Dija Damayanti Mokodongan, sama-sama ingin segera menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon Istrinya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon istri anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon Istrinya;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon masih berumur 17 tahun, namun telah mengajukan dispensasi Nikah dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA Amg tanggal 3 Pebruari 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan calon Istrinya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon Istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan akibat kedekatan anak Pemohon dan calon istrinya sehingga calon isteri anak Pemohon hamil 3 bulan dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, adanya fakta bahwa kedua orang tua mereka beserta keluarga besarnya telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan lebih menambah mudharat yang lebih besar;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fihiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madhorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya" (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata calon istri anak Pemohon yang bernama Dija Damayanti juga belum memenuhi syarat dalam hal umur untuk menikah karena calon istri anak Pemohon lahir tanggal 9 Oktober 2004 baru berusia 17 tahun 5 bulan, namun oleh karena calon istri anak Pemohon

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan dispensasi nikah dan telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA Amg tanggal 3 Februari 2022, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya Bernama Dija Damayanti Mokodongan Binti Latif Mokodongan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama Calon isteri anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis, tanggal 3 Pebruari 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Maasyrifah Abasi,

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Adil, S.Ag, M.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag, M.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
4. PNPB Panggilan I	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)